



**DINAS  
KOMUNIKASI  
DAN  
INFORMATIKA**

# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## **2023**

[www.diskominfo.depok.go.id](http://www.diskominfo.depok.go.id)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2023 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Strategis Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2023 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfo Kota Depok. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit kerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Segala masukan dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan penyusunan LAKIP Diskominfo di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga LAKIP Diskominfo Kota Depok Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi tolok ukur perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.

Depok, Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok



Drs. Manto, M.Si

NIP. 1967050419861210002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel .....	vi
Ikhtisar Eksekutif.....	vii
LAMPIRAN	
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum .....	3
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
1.5. Sistematika Penyajian.....	8
<b>BAB II</b>	
<b>PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Rencana Strategis.....	9
2.1.1 Visi dan Misi .....	9
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	12
2.1.3 Janji Walikota .....	16
2.2. Indikator Kinerja Utama .....	18
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	18
<b>BAB III</b>	
<b>AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>21</b>
2.2. Pengukuran Kinerja .....	21

2.3.	Analisis Capaian Kinerja.....	18
3.5.	Janji Wali Kota .....	36
3.6.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	40
3.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan ....	50
3.8.	Realisasi Anggaran Per Sasaran .....	59
<b>BAB</b>		<b>IV</b>
<b>PENUTUP</b> .....		<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
2.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	13
2.2 Indikator Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 – 2026	16
2.3 Indikator Kinerja Utama	18
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	19
2.5 Rincian Program dan Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	22
3.2 Pengukuran Kinerja Dnas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2023	24
3.3 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan SPBE	27
3.4 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	33
3.5 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	36
3.6 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan pengelolaan dan layanan statistik sektoral	38
3.7 Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	41
3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
3.9 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan	53
3.10 Realisasi Anggaran Per Sasaran	59

## IKHSTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2023 yang melibatkan seluruh bidang/bagian di Diskominfo Kota Depok. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan hasil Pengukuran Kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 telah ditetapkan lima sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfo Kota Depok. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan presentase capaian kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.7	3,55	131,48	Melebihi target
2	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.5	2.5	100	Sesuai Target

3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	86	93,18	108,34	Melebihi Target
<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2023</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (%)</b>	<b>KET.</b>
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	50%	50 %	100	Sesuai Target
5	Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	75.85	77.75	102,5	Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, dari 5 indikator tersebut terdapat 2 (Dua) indikator dengan hasil realisasi melebihi target yaitu sasaran Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE dengan indikator kinerja Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik dengan indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%) dan 2 (dua) indikator dengan hasil realisasi sesuai target yaitu sasaran Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi dengan indikator kinerja sasaran Indeks Keamanan Informasi (KAMI),

Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik dengan indikator sasaran dan Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan indikator Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang capaiannya masing-masing di atas 100% . Terdapat 1 (satu) indikator yaitu nilai SAKIP Diskominfo sampai saat ini hasil nilai belum ada, sehingga masih menggunakan penilaian SAKIP tahun 2023. 1 (satu) indikator yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE sampai dengan saat ini belum diperoleh laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kementerian PANRB.

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2023, total Anggaran Diskominfo Kota Depok adalah sebesar Rp. 38.218.075.139 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 35.994.725.607 (Tiga puluh lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah enam ratus tujuh puluh rupiah) atau 94,18%, yang didukung oleh 5 (Lima) Program, 10 (Sepuluh) kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) sub kegiatan.

Depok, Januari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok



Drs. Manto, M.Si

NIP. 1967050419861210002

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab demi terselenggaranya *good governance* yang merupakan persyaratan utama dalam /mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Kebijakan umum pemerintah dalam kerangka pembangunan *good governance* adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil dimana fokus pembangunan pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.

*Good governance* yang dimaksud adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan pelayanan publik yang melibatkan semua pihak di antaranya pemerintah, *private sector* dan masyarakat untuk dapat berkoordinasi dengan baik sehingga akan menghasilkan integritas, profesionalisme, etos kerja dan moralitas yang tinggi.

Wujud akuntabilitas pemerintah yang selama ini digunakan adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 07 Tahun 1999 dan kemudian melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Diskominfo Kota Depok, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun Anggaran 2023. Laporan akuntabilitas ini dibuat berdasarkan pelayanan yang telah dilaksanakan mengacu pada tugas dan fungsi pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam bentuk capaian program/ kegiatan yang termasuk dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Dinas Tahun 2023.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kinerja program/kegiatan Diskominfo Kota Depok dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Depok di Tahun Anggaran 2023. Sedangkan tujuannya adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Diskominfo Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Diskominfo Kota Depok pada Tahun Anggaran 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Diskominfo Kota Depok di masa yang akan datang.

### **1.3. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- i. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
- n. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 2);
  - o. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
  - p. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
  - q. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
  - r. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik;
  - s. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 40);
  - t. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 72);
  - u. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 87);
  - v. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pejabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
  - w. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

#### 1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

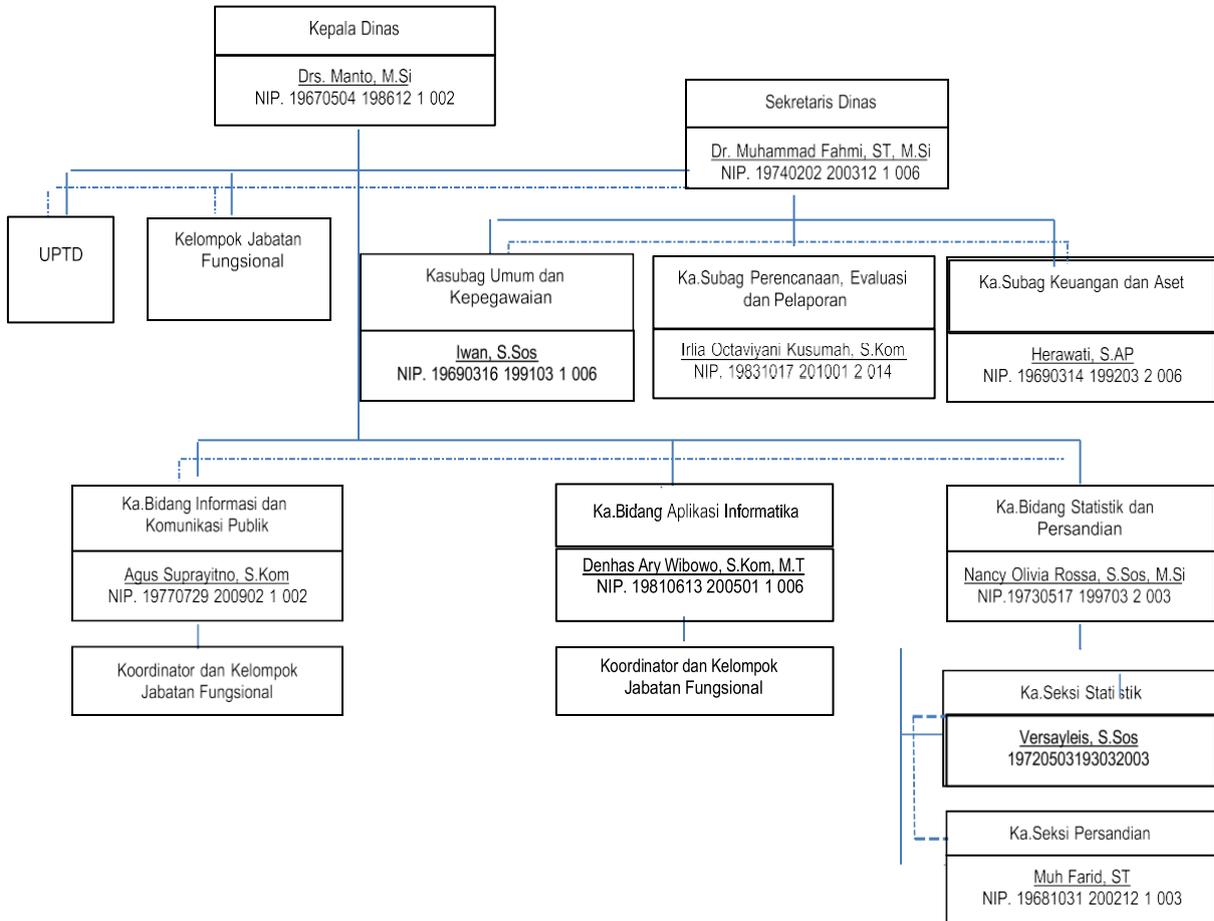
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok merupakan unsur Pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik.

Mempunyai tugas membantu Wali ota melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota. Adapun fungsi Diskmoinfo adalah menyelenggarakan

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Diskominfo Kota Depok dipimpin oleh satu orang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Diskominfo Kota Depok secara rinci dapat dilihat pada gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Diagram Struktur Organisasi  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok**



## **1.5. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Diskominfo Kota Depok Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2023.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan kinerja yang meliputi perencanaan strategis dan penetapan kinerja.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Dalam bab ini menggambarkan tentang akuntabilitas kinerja yang terdiri atas capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung terwujudnya pencapaian kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini diuraikan tentang keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

##### 2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat maka visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2021 - 2026 adalah :

#### **“Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera”**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021 - 2026 visi Kota Depok didefinisikan sebagai berikut :

**Kota Depok**, didefinisikan sebagai :

Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu.

**Maju**, didefinisikan sebagai :

Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.

**Berbudaya**, didefinisikan sebagai :

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.

**Sejahtera**, didefinisikan sebagai :

Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

Visi RPJMD Kota Depok Tahun 2021 - 2026 merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Kota Depok sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kota Depok Tahun 2006-2025 yaitu **Depok Kota Niaga dan Jasa, yang Religius dan Berwawasan Lingkungan**.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok di atas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok Tahun 2021 - 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Depok, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi maka Diskominfo Kota Depok menjalankan misi pertama yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan dan misi kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif.

#### **2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Depok. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung terciptanya layanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

Adapun Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Menyelenggarakan tata kelola SPBE yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan, regulasi dan prosedur kerja sebagai (bahan acuan dalam penerapan SPBE)</li> <li>2. Membangun keterhubungan jaringan infrastruktur TIK di Kota Depok</li> <li>3. Standarisasi dan integrasi jaringan dan aplikasi prioritas di seluruh perangkat daerah</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Meningkatkan Sarana dan Prasarana serta kualitas SDM pada Bidang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana serta peningkatan kualifikasi teknis untuk SDM pada Bidang Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi</li> <li>Menyusun regulasi sertifikat elektronik, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh PD dan melaksanakan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Depok</li> <li>Melaksanakan pengamanan informasi kegiatan strategis dan melaksanakan pendampingan PD dalam menggunakan sandi di lingkungan Pemerintah Kota Depok.</li> </ol>
<b>Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif</b>			
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	1. Meningkatkan kualitas layanan Informasi dan Komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan peran PPID di semua PD</li> <li>Optimalisasi media komunikasi publik milik pemerintah</li> <li>Meningkatkan pemantauan opini dan aspirasi publik</li> <li>Melakukan pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik</li> </ol>
		2. Meningkatkan kuantitas layanan Informasi dan Komunikasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi penyelenggaraan hubungan media dan kemitraan komunitas (KIM)</li> <li>Menyelenggarakan hubungan masyarakat (GPR)</li> </ol>

	3. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas data, serta analisis data statistik sektoral	Melaksanakan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Depok
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatkan layanan dan informasi data Statistik Sektoral	1. Melakukan Pengumpulan, pengolahan dan analisis, serta diseminasi/publikasi Data Statistik Sektoral Kota Depok
		3. Meningkatkan layanan integrasi data	1. Melakukan pembinaan simpul jaringan data di Perangkat Daerah. 2. Melakukan pendampingan SDM statistik pada seluruh PD
	4. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja (sesuai standar)	Meningkatkan sarana dan prasarana kerja
		2. Meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan dan pelaporan	Melaksanakan penyusunan dan pengolahan dokumen perencanaan dan pelaporan

**Tabel 2.2. Matrik Perencanaan Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 - 2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET SASARAN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui layanan Satu Data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.00
	2. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	1.5	2	2.5	2.5	3.0	3.5
	3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	52,80%	52,90%	86%	87%	88%	89%
	4. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	5%	20%	50%	70%	80%	90%
	5. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai Sakip Diskominfo	73.39	74.53	75.85	77.57	78.52	80.57

### **2.1.3. Janji Wali Kota**

Selain untuk menjawab isu-isu yang ada, program kerja Diskominfo Kota Depok juga dilaksanakan untuk menjawab janji politik Wali Kota yang telah disampaikan pada proses politik. Adapun program kerja yang menjawab janji politik wali kota yang menjadi tanggung jawab Diskominfo adalah penyediaan wifi gratis untuk masyarakat di Kota Depok di setiap RW melalui Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor : 800/44.1/Kpts/Diskominfo/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.

**Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.7
2. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.5
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	86%
4. Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	50%
5. Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	75.85

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran dengan mengacu pada rencana strategis Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 - 2026 dan sumber daya anggaran yang ada. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang menjadi tugas utama Diskominfo Kota Depok dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Perjanjian Kinerja Diskominfo Kota Depok Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.7
2	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.5
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	86%
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	50%
5	Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	75.85

Total Anggaran Diskominfo Kota Depok pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 38.218.075.139,- (Tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah). Dengan rincian dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Rincian Program dan Anggaran Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.737.667.039,00	Mendukung Sasaran Strategis Kelima
2	Aplikasi Informatika	Rp. 17.132.246.250,00	Mendukung Sasaran Strategis Kesatu
3	Informasi Komunikasi Publik	Rp. 7.040.261.250,00	Mendukung Sasaran Strategis Ketiga
4	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 1.177.177.900,00	Mendukung Sasaran Strategis Keempat
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi	Rp. 2.130.722.250,00	Mendukung Sasaran Strategis Kedua
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>Rp. 38.218.075.139,00</b>	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Diskominfo Kota Depok sebagai pengemban amanah masyarakat Kota Depok melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stakeholders* atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah

atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2023 dilaporkan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama Tahun 2023. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>	<b>Kode</b>
1	≥ 90	Sangat Baik	
2	75.00 - 89.99	Baik	
3	65.00 - 74.99	Cukup	
4	50.00 - 64.99	Kurang	
5	0 – 49.99	Sangat Kurang	

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah melalui Keputusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Nomor : 800/44.1/Kpts/Diskominfo/2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Depok Tahun 2023**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA (%)	KET.
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.7	3,55	131,48	Melebihi Target
2	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.5	2.5	100	Sesuai Target
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%)	86	93,18	108,34	Melebihi Target
4	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase pemanfaatan data statistik sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (%)	50%	50 %	100	Sesuai Target
5	Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai SAKIP Diskominfo	75.85	77.75	102.5	Hasil Penilaian SAKIP Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 3.2. di atas terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok, dari 5 indikator tersebut terdapat 2 (Dua) indikator dengan hasil realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik dengan indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik (%) yang capaiannya di atas 100% . Terdapat 1 (satu) indikator yaitu nilai SAKIP Diskominfo sampai saat ini belum ada nilai sehingga masih menggunakan nilai SAKIP Tahun 2022, 1 (satu) indikator yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE sampai dengan saat ini belum diperoleh laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Kementerian PANRB.

### **3.2. Analisis Capaian Kinerja**

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui dokumen Penetapan Kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok pada Tahun 2023 melaksanakan 3 urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian dengan 5 program, 10 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1**, yaitu : **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE** dengan indikator kinerja **Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE** dengan **target kinerja di Tahun 2023 sebesar 2.7.**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian wawancara, serta penilaian kunjungan (pada instansi tertentu).

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE



Nama Indeks	Nilai 2023
<b>SPBE</b>	<b>3,7</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	4,80
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,80
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	3,80
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	4,00
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	2,18
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,13
<i>Audit TIK</i>	2,33
<b>Domain Layanan SPBE</b>	3,88
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,17

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu melalui proses verifikasi, klarifikasi dan validasi dokumen pendukung, Penilaian Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE itu sendiri didasarkan pada Domain Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, Penyelenggaraan SPBE, Manajemen SPBE yang terdiri 47 indikator.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan capaian indeks SPBE Kota Depok sebesar 3.70 dengan tingkat kematangan kapabilitas proses SPBE sebesar 3.55.

Tabel 3.3.

**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2.7	3,55	131,48	3.42	3.5

Capaian Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses di Tahun 2023 telah mencapai nilai 3.55, hasil tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan di tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 131.48%. Hasil tersebut meningkat 0,13 poin dari tahun 2022 dengan nilai realisasi 3.42. Capaian ini telah melebihi target akhir Renstra dengan nilai 3.50.

**Analisis penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja**

Upaya pencapaian sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE di Kota Depok didukung oleh berbagai pihak dan koordinasi yang baik dengan semua perangkat daerah yang ada di Kota Depok. Diskominfo Kota Depok dalam upaya untuk mencapai indeks kapabilitas proses SPBE di Tahun 2023 telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya adalah :

1. Penyusunan Peta Rencana SPBE untuk memberikan kerangka dasar yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Kota Depok.

2. Untuk meningkatkan kompetensi SDM TIK maka dilaksanakan beberapa pelatihan baik dilaksanakan secara mandiri maupun diikutsertakan dalam pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi nasional sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan internasional sesuai bidang kerja yang digeluti seperti : pelatihan *digital transformation*, pelatihan dan sertifikasi *chief information officer (CIO)*, pelatihan dan sertifikasi *cloud computer analyst*, pelatihan dan sertifikasi manajer pengelola layanan IT (ITSM), pelatihan dan sertifikasi pengelolaan data center, pelatihan dan sertifikasi pengelolaan layanan teknologi informasi, pelatihan dan sertifikasi *data center foundation certificate (DCFC) – VILT*, pelatihan dan sertifikasi *database administrator*, pelatihan dan sertifikasi *network administrator*.
3. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan aplikasi *e-office* kepada seluruh perangkat daerah.
4. Pengelolaan portal depok.go.id dan website/portal yang memiliki sub domain depok.go.id serta aplikasi yang berdomain depok.go.id meliputi *update* lisensi, menyediakan tenaga ahli yang menagani portal serta menyediakan software pendukung aplikasi.
5. Pengembangan aplikasi SILO (e-kelurahan) dengan perbaikan sistem e-kelurahan versi sebelumnya dan integrasi dengan aplikasi teman kerja. dan pengembangan aplikasi *Depok Single Window (DSW)* baik pada *play store* maupun *apps store*, meliputi:
  - Update / Perbaikan Menu Wifi
  - Update / Perbaikan Menu BNN
  - Penambahan Menu Bantuan Sosial
  - Perbaikan Layanan Informasi Saku Bumil
  - Penambahan Layanan Siape-Die
  - Penambahan Layanan e\_pbb
  - Penambahan Layanan etpd
  - Update / Perbaikan Layanan Tecomdep
  - Penambahan Layanan Kapasitas Tempat Tidur RS (Siranap)

- Penambahan Konten Pendidikan
  - Penambahan Layanan Informasi Pelatihan (Simpel)
  - Penambahan Rating Layanan
  - Update / Perbaikan antar muka
    - Update / Perbaikan Fitur Pencarian
    - Penambahan Daftar Layanan Populer
    - Penambahan Icon Play pada video
    - Perbaikan tampilan halaman login
    - Perbaikan tampilan halaman panggilan darurat
    - Perbaikan tampilan halaman profil
  - Update/ Perbaikan Data
  - Perbaikan CMS Push Notifikasi
  - Dashboard Report Aktifitas Pengguna
  - Perbaikan Portal dsw (dsw.depok.go.id)
  - Pemeliharaan bug – bug error aplikasi
6. Pengembangan aplikasi Data Warehouse atau pusat data Pemerintah Kota Depok dengan tujuan agar distribusi dan pertukaran data elektronik antar instansi yang diselenggarakan secara online dapat dilaksanakan dengan lebih baik secara kualitas maupun kuantitas ragam data. Saat ini telah ada 12 (dua belas) perangkat daerah dengan 20 aplikasi yang datanya telah ditarik ke dalam *data warehouse*, yaitu :
- Dinas Kesehatan : Simpus, SJP, Sippkling, Tenaga Medis (Sisdmk Kementrian), SiBima
  - RSUD KSA : SIMRS
  - Dinas Pendidikan : DAPODIK
  - BKPSDM : SIMPEG
  - Disdukcapil : Data Agregat Kependudukan
  - DPMPTSP : Perizinan online, OSS
  - BKD : Simpad, SIPKD
  - Diskominfo : SIGAP

- Disnaker : BKOL
  - Disdagin : Sifordagin
  - Setda : Hibah Bansos / EBERbagi
  - Dinsos : DTKS, Sitpas
  - PUPR : PUPR Spatial Data
7. Penyediaan pusat data terpadu yang berada di lantai 5 gedung balaikota dan Lantai 7 gedung dibaleka II Pemerintah Kota Depok untuk menampung semua server yang dimiliki oleh perangkat daerah yang ada di Kota Depok.
  8. Pengembangan *command center* atau Depok *City Operation Room* (DeCor) yang berfungsi sebagai infrastruktur utama TIK serta sebagai ruang kendali segala aktifitas manajemen dan pelayanan terhadap masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Depok.
  9. Penyediaan layanan koneksi intranet dan internet, dengan rincian :
    - Koneksi internet Link 1 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di kompleks Balaikota dengan konfigurasi router BGP failover, yaitu jika terdapat salah satu link mengalami kendala (link 1 atau link maka akan dialihkan ke link lainnya. Koneksi internet yang disediakan adalah layanan akses internet dedicated menggunakan media core fiber optic sampai dengan handhole Balaikota Depok dengan bandwidth sebesar 500 Mbps.
    - Koneksi internet Link 2 ditujukan untuk menopang penyediaan layanan koneksi internet Link 1 dengan cakupan wilayah dan konfigurasi router sama dengan Link 1 dengan bandwidth *main link* 500 Mbps internasional dan 500 Mbps Domestik.
    - Penyediaan koneksi internet perangkat daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di luar kompleks Balaikota dengan bandwidth main link 400 Mbps internasional dan 400 Mbps Domestik serta penyediaan *Access Point* 137

unit dan *Router* 133 unit di 133 lokasi seperti Dinas PUPR (4 titik), DLHK, RSUD ASA, RSUD KISA, 11 kecamatan, 63 kelurahan, 38 Puskesmas, 6 kantor UPT Damkar, 6 UPT Pasar, UPT Rusunawa, UPT Puskesmas, Labkesda, Gedung Kantor P2TP2A, Balai Latihan Koperasi.

- Penyediaan layanan koneksi internet publik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet gratis bagi masyarakat dan kantor instansi pemerintah lainnya dengan bandwidth main link 500 Mbps Internasional dan 500 Mbps Domestik serta penyediaan *Access Point* 155 unit dan Router 118 unit di 118 lokasi seperti di instansi vertikal, balai warga, Mesjid, Mushola, Posyandu, taman, jembatan penyebrangan orang, kantor RW, balai wartawan, kantor PWI.
  - Penyediaan layanan internet mobile untuk memfasilitasi layanan Zoom Meeting atau Video Streaming kegiatan-kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan diluar jaringan milik Diskominfo Depok, seperti di balai pertemuan, lapangan atau area publik lainnya.
  - Layanan koneksi internet RW ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet gratis bagi masyarakat Kota Depok sebagai pemenuhan salah satu janji wali kota yaitu penyediaan wifi gratis di setiap RW sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kota Depok 2021 - 2026. Penyediaan Koneksi Internet RW dengan media Fiber Optik sebanyak 880 (Delapan Ratus Delapan Puluh) titik di seluruh RW yang ada di Kota Depok selama 12 (Dua Belas) bulan dengan Bandwidth Internasional minimal 30 Mbps atau setara Internet Dedicated dengan kecepatan Bandwidth minimal 5 Mbps;
10. Pemeliharaan jaringan internet dan fiber optic serta pemeliharaan 29 titik CCTV milik Diskominfo Kota Depok

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE didukung oleh Program Aplikasi Informatika dengan 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
    - b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
    - a. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
    - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
    - c. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
    - d. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
    - e. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
- b. Sasaran 2, yaitu : Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi** dengan indikator kinerja **Indeks Keamanan Informasi (KAMI)** dengan indikator kinerja di Tahun 2023 adalah 2.5.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era siber yang terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh terhadap keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan assessment dan evaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Alat evaluasi ini digunakan secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang

dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait.

**Tingkat kelengkapan** penerapan indeks KAMI berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001 meliputi :

1. Tata Kelola
2. Pengelolaan Risiko
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
4. Pengelolaan Aset
5. Teknologi dan Keamanan Informasi
6. Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga
7. Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan
8. Perlindungan Data Pribadi

**Tabel 3.4.**  
**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.5	2.5	100	2.4	3.5

Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Pada Tahun 2023, capaian kinerja Indeks KAMI Kota Depok sebesar 100%, dengan nilai sebesar 2.5 sesuai dengan target yang telah ditetapkan di Tahun 2023 yaitu

2.5. Berdasarkan table 3.4 terlihat bahwa Indeks KAMI di 2023 mengalami peningkatan sebesar 0.1 poin dibandingkan Tahun 2022.

### **Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Indeks KAMI dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 diantaranya adalah :

1. Melaksanakan Vulnerability Assesment (VA) pada aplikasi mobile di Pemerintah Kota Depok sebanyak satu aplikasi yaitu Depok Single Windows (DSW). VA dilakukan untuk menutup celah kerawanan yang ada.
2. Melaksanakan VA pada aplikasi web di Pemerintah Kota Depok sebanyak 10 (sepuluh) aplikasi dengan menggunakan *tool acunnetix* yang berbayar.
3. Penetration Test terhadap 40 (empat puluh) aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Depok. Selanjutnya dilakukan tindak lanjut dengan mengirimkan pemberitahuan kepada perangkat daerah terkait segera menutup celah kerawanan tersebut.
4. Sertifikat ISO 27001 : 2013 untuk infrastruktur data center, Pemerintah Kota Depok telah melaksanakan kegiatan surveillance ISO 27001:2013. Berdasarkan hasil audit surveillance ISO 27001:2013, terdapat 2 temuan ketidaksesuaian audit Minor dan temuan 4 OFI dan telah dilakukan tindak lanjut terhadap hasil temuan tersebut. Diskominfo Kota Depok dinyatakan dapat melanjutkan Sertifikasi ISO 27001 : 2013.

Selain itu ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pencapaian sasaran ini diantaranya adalah :

1. Belum memadainya tools VA karena lisensi hanya dapat digunakan melakukan VA untuk 10 (sepuluh) aplikasi sedangkan aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok cukup banyak. Agar sistem keamanan informasi dapat berjalan maksimal maka dibutuhkan penambahan tools untuk pengamanan aplikasi website dan *mobile*.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menindaklanjuti temuan hasil VA dan penetrarion testing di semua perangkat daerah belum memenuhi kebutuhan sehingga celah kerentanan tidak dapat segera ditanggulangi. Sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan informasi agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Saran meningkatnya pengelolaan persandian dan pengujian kemanan informasi didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Operasional

- c. **Sasaran 3, yaitu : Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik** dengan Indikator kinerja sasaran **Indeks Keterbukaan Informasi Publik** sebesar **86%**.

Mengacu kepada Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik harus menyediakan informasi yang diperlukan masyarakat sebagai pengguna informasi publik. Sejak tahun 2021, Komisi Informasi Pusat telah menyusun dan menetapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Tingkat Provinsi dan Nasional, di Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat mendapatkan predikat Informatif (93.18%).

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Depok melalui Diskominfo Kota Depok masuk ke dalam kategori Kota/Kabupaten Informatif dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Provinsi Jawa Barat. Terdapat lima kualifikasi badan

publik yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif dan tidak informatif. Di Tahun 2022 Kota Depok berada pada kategori menuju informatif, dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Tahun 2023 yang sudah mencapai Informatif. Bahkan telah melebihi target akhir dalam Renstra Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 – 2026. Sehingga hal ini menjadi salah satu dasar bagi Diskominfo Kota Depok untuk mereview kembali target kinerja dalam Renstra 2021 – 2026. Pencapaian ini tidak lepas dari dukungan semua Perangkat Daerah dalam menciptakan keterbukaan informasi publik di Kota Depok secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

**Tabel 3.5.**

**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	86% (Menuju Informatif)	93,18 % (Informatif)	108,34	85 % (Informatif)	89% (Menuju Informatif)

**Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja**

Telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi di Kota Depok, diantaranya adalah dengan selalu menyajikan informasi berkala, serta merta dan setiap saat di dalam website Pemerintah Kota Depok dan PPID Kota Depok. Selain itu juga bekerjasama dengan berbagai pihak baik media nasional maupun lokal dalam menyampaikan informasi publik yang ada di Kota Depok.

Selain itu, Capaian Indikator Kinerja ini juga didukung oleh berbagai layanan yang telah disediakan oleh Diskominfo Kota Depok seperti layanan

pengaduan Call Center 112, Aplikasi SIGAP, SP4N LAPOR yang merupakan Kolaborasi dan sinergi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Ombudsman RI dan membangun/membuat berbagai media informasi seperti media cetak, media elektronik (web site, media online, dsb), talk show, siaran melalui televisi dan radio. Selain hal tersebut Diskominfo juga selalu memonitoring dan evaluasi hasil dari pembangunan web site di semua Perangkat Daerah, sehingga semua Perangkat Daerah dapat mengisi/melaporkan berbagai aktivitas program/kegiatan di lingkungannya masing-masing. Disamping itu Diskominfo Kota Depok telah memberdayakan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk pembantu yang ada di setiap Perangkat Daerah untuk ikut aktif dalam penanganan pengaduan dan permohonan informasi publik. Untuk mendukung capaian indikator kinerja tersebut didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
  2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
  3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
  4. Pelayanan Informasi Publik
  5. Manajemen Komunikasi Publik
  6. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
  7. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- d. Sasaran 4, yaitu : **Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dengan Indikator kinerja sasaran Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebesar 50 %.**

Hasil capaian kinerja pada sasaran strategis ini tercapai, seperti terlihat pada tabel 3.8 berikut ini.

**Tabel 3.6.**  
**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi	50%	50%	100	25 %	60%

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data. Penyediaan data statistik harus berkualitas dan akurat serta dapat mendukung proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah. Formulasi perhitungan indikator kinerja ini berdasarkan perhitungan akumulasi data sektoral yang tersedia di bagi 28 data sektoral yang harus ada sesuai dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok.

Di tahun 2023 berdasarkan tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja sasaran ini telah mencapai 100% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini tidak bisa dibandingkan dengan dan tahun 2021. Dari 28 data sektoral yang ada baru 14 data sektoral yang tersedia di tahun 2023 yaitu data sektoral di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, tenaga kerja, pertanian, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, perhubungan, koperasi usaha kecil dan menengah, pariwisata dan kebudayaan, serta perdagangan industri.

### **Analisis penyebab Keberhasilan Capaian Kinerja**

Dalam Pelaksanaan penyediaan data statistik sektoral tahun 2023, Diskominfo Kota Depok melalui seksi statistik bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang berkompeten, dalam kesempatan ini adalah Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor melalui Mekanisme Swakelola Tipe II. Kerjasama ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 050/226/NK-SWA/Diskominfo/2023 tanggal 16 Februari 2023. Adapun data yang dihasilkan adalah data-data indikator makro di level Kecamatan Kota Depok, seperti :

- Data Analisis Ekonomi Makro
- Data Analisis Kesejahteraan Rakyat Kecamatan
- Data Analisis Pembangunan Manusia Kecamatan
- Data Analisis Ketimpangan Ekonomi Kecamatan
- Data Indeks Kebahagiaan Kota Depok
- Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Depok tahun 2023

Diskominfo Kota Depok juga berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Depok dalam hal penggandaan buku-buku Statistik hasil Publikasi Badan Pusat Statistik Kota Depok dimana Diskominfo menggandakan sebagai Cetakan Kedua untuk selanjutnya didistribusikan kepada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Depok dan masyarakat yang membutuhkan data statistik sektoral, seperti :

- Buku Depok Dalam Angka
- Buku Kecamatan Dalam Angka
- Buku PDRB Menurut Pengeluaran Kota Depok
- Buku PDRB menurut Lapangan Usaha Kota Depok
- Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Depok dan/buku IPM Kota Depok

Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM statistik di lingkup pemerintah Kota Depok, telah dilaksanakan kegiatan berupa pelatihan dan pengembangan kompetensi khususnya mengenai Manajemen Data, sosialisasi dan pendampingan penyusunan Metadata Statistik Sektoral yang ditujukan bagi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Depok agar Perangkat Daerah dapat mengetahui langkah-langkah penyusunan Metadata, sehingga nantinya dapat menyusun metadata dari data statistik sektoral yang dimiliki.

Sasaran ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  2. Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
  3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
  4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- e. **Sasaran 5**, yaitu : **Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal** dengan indikator kinerja sasaran **Nilai Sakip Diskominfo** sebesar **75.85**

Indikator ini untuk mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kota Depok. Evaluasi implementasi SAKIP di lingkungan Diskominfo Kota Depok Tahun 2021 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Depok. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2021 Nomor 700/212/Evaluasi/Insp-2022 disebutkan bahwa Nilai SAKIP Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	23.70
b	Pengukuran Kinerja	30	23.70
c	Pelaporan Kinerja	15	11.85
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18.50
	<b>HASIL EVALUASI</b>	<b>100</b>	<b>77.75</b>
	<b>KATEGORI</b>		<b>BB</b>

Perbandingan realisasi nilai implementasi SAKIP Diskominfo Kota Depok Tahun 2022 dengan target di Tahun 2023, realisasi 2022 dan target akhir Renstra 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**

**Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi pada Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal**

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN	REALISASI 2022	TARGET 2026 (AKHIR RENSTRA)
1	Nilai SAKIP Diskominfo	75.85	77.75	99.89	74.45	80.57

Hasil capaian penilaian SAKIP Diskominfo untuk Tahun 2022 adalah sebesar 74.45 dengan kategori BB (Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Andal), akan tetapi angka tersebut tidak mencapai target yang

telah ditetapkan yaitu 74.53 atau dengan capaian kinerja 99.89%. Penilaian SAKIP Tahun 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, penilaian di Tahun 2022 mengikuti Permenpan PAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berbeda dari tahun sebelumnya yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu manajemen kinerja, pengukuran kinerja, palaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja.

### **Analisis penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja**

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di Diskominfo Kota Depok, diantaranya :

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari eselon 2 sampai dengan unit kerja terkecil.
- Peningkatan kualitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada Tahun 2023, Diskominfo Kota Depok akan melaksanakan beberapa hal, diantaranya :

- Reviu Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 – 2026, hasil dari pelaksanaan reviu akan ditindaklanjuti dengan revisi Renstra;
- Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) terutama pada aspek metode/cara pengukuran setiap IKU;
- Sosialisasi penerapan E-SAKIP bagi petugas penyusun laporan kinerja di setiap bidang;

Terdapat 4 (empat) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu :

- I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- III. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Barang Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- IV. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

### 3.5. Janji Wali Kota

Pemenuhan Janji Wali Kota Depok yang menjadi tanggung jawab Diskominfo Kota Depok adalah Penyediaan Wifi Gratis untuk Masyarakat di setiap RW. Pemenuhan janji wali kota ini dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Depok melalui Program Aplikasi Informatika dengan Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Layanan koneksi internet RW ditujukan untuk memenuhi kebutuhan internet gratis bagi masyarakat Kota Depok untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan RW sebagaimana kelanjutan kegiatan pada tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut : Penyediaan Koneksi Internet RW/Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan media Fiber Optik dengan target 1834 (seribu delapan ratus tiga puluh empat) titik selama 11 (sebelas) bulan, dengan rincian

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Titik Wifi	
		Rencana Pemasangan	Realisasi Pemasangan
<b>Beji</b>		<b>72</b>	<b>72</b>
	Beji	16	16
	Beji Timur	7	7
	Kemiri Muka	18	18
	Kukusan	8	8
	Pondok cina	9	9
	Tanah Baru	14	14
<b>Bojongsari</b>		<b>106</b>	<b>105</b>

	Bojongsari Baru	10	10
	Bojongsari Lama	17	16
	Curug	12	12
	Duren Mekar	10	10
	Duren Seribu	14	14
	Pondok Petir	24	24
	Serua	19	19
<b>Cilodong</b>		<b>76</b>	<b>76</b>
	Cilodong	6	6
	Jatimulya	9	9
	Kalibaru	17	17
	Kalimulya	17	17
	Sukamaju	27	27
<b>Cimanggis</b>		<b>68</b>	<b>68</b>
	Cisalak Pasar	7	7
	Curug	9	9
	Harjamukti	5	5
	Mekarsari	17	17
	Pasir Gunung Selatan	13	13
	Tugu	17	17
<b>Cinere</b>		<b>30</b>	<b>30</b>

	Cinere	11	11
	Gandul	11	11
	Pangkalan Jati	3	3
	Pangkalan Jati Baru	5	5
<b>Cipayung</b>		<b>63</b>	<b>63</b>
	Bojong Pondok Terong	14	14
	Cipayung	16	16
	Cipayung Jaya	4	4
	Pondok Jaya	12	12
	Ratu Jaya	17	17
<b>Limo</b>		<b>41</b>	<b>41</b>
	Grogol	8	8
	Krukut	8	8
	Limo	13	13
	Meruyung	12	12
<b>Pancoran Mas</b>		<b>87</b>	<b>87</b>
	Depok	18	18
	Depok Jaya	13	13
	Mampang	15	15
	Pancoran Mas	18	18
	Rangkapan Jaya	14	14

	Rangkapan Jaya Baru	9	9
<b>Sawangan</b>		<b>94</b>	<b>93</b>
	Bedahan	18	18
	Cinangka	15	15
	Kedaung	15	15
	Pasir Putih	16	15
	Pengasinan	11	11
	Sawangan	8	8
	Sawangan Baru	11	11
<b>Sukmajaya</b>		<b>108</b>	<b>108</b>
	Abadi Jaya	26	26
	Baktijaya	25	25
	Cisalak	10	10
	Mekarjaya	27	27
	Sukmajaya	13	13
	Tirta Jaya	7	7
<b>Tapos</b>		<b>135</b>	<b>135</b>
	Cilangkap	17	17
	Cimpaeun	23	23
	Jatijajar	19	19
	Leuwinanggung	10	10

	Sukamaju Baru	14	14
	Sukatani	41	41
	Tapos	11	11
<b>Grand Total</b>		<b>880</b>	<b>878</b>

- Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan di Tahun 2023 direncanakan di awal sejumlah 880 titik wifi, dengan realisasi pemasangan sebanyak 878 titik wifi. Ada 2 titik lokasi yang belum terpasang, yaitu di Saung Pokdarwis rt 02 rw 08, Kel. Bojongsari, Kec. Bojongsari dan di Masjid Baiturasyid, Jl. Kemang Kp. Kekupu Rt 04 Rw 05 Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan.
- Untuk di Saung Pokdarwis rt 02 rw 08, Kel. Bojongsari, Kec. Bojongsari terdapat kendala dalam pemasangan wifi di lokasi tersebut dikarenakan tiang FO (Fiber Optik) jauh dari lokasi, sehingga diperlukan penambahan tiang-tiang baru yang melewati pemukiman warga.
- Sedangkan untuk di Masjid Baiturasyid, Jl. Kemang Kp. Kekupu Rt 04 Rw 05 Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan terdapat kendala dalam pemasangan wifi dikarenakan ODP (Optical Distribution Point) terdekat sudah penuh dan ODP selanjutnya jaraknya terlalu jauh lebih dari 300 meter dari lokasi tersebut.
- Pagu anggaran Layanan Internet RW TA. 2023 yang dianggarkan dalam DPA dan diumumkan dalam RUP sebesar Rp. 5.491.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.849.354.769,- atau 88,31%.

### 3.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada di Kota Depok khususnya pada Diskominfo Kota Depok sangat menjadi prioritas Wali Kota Depok dalam mewujudkan janji politiknya yang tertuang dalam RPJMD Kota Depok yang didukung oleh Program Prioritas didalamnya. Dalam pelaksanaannya Diskominfo dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik berupa anggaran, sarana prasarana penunjang

pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. . Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Depok dalam rangka efisiensi penganggaran di Tahun 2023, yaitu melakukan penjadwalan ulang kegiatan dan memprioritaskan kegiatan untuk menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Renstra dan PK.

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Diskominfo Kota Depok selama Tahun 2023 dapat diuraikan pada tabel 3.10 berikut ini :

**Tabel 3.8**

**Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusn Pemda	100%	100%	100%	10.737.667.039	9.803.145.103	91,30	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	83.906.600	81.826.600	97,52	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	49.761.300	47.811.300	96,08	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17 Laporan	17 Laporan	100%	34.145.300	34.015.300	99,62	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
II	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase administrasi keuangan tepat waktu</b>	100,00%	100,00%	100%	9.060.746.839	8.211.859.335	90,63	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	51 Orang/bulan	51 Orang/Bulan	100%	9.041.249.189	8.192.373.685	90,61	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	18 Laporan	18 Laporan	100%	19.497.650	19.485.650	99,94	
III	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%	100%	1.242.708.600	1.204.412.237	96,92	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	100%	7.195.000	7.195.000	100,00	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis alat tulis kantor	11 paket	11 Paket	100%	515.902.000	484.268.530	93,87	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan rumah tangga	1 paket	1 paket	100%	16.482.600	13.776.600	83,58	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis makanan dan minuman	2 paket	2 paket	100%	143.807.000	143.570.000	99,84	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Jenis barang cetakan dan pengadaan	1 paket	1 paket	100%	36.638.000	36.638.000	100,00	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah orang/hari	150 laporan	150 laporan	100%	522.684.000	518.964.107	99,29	
<b>IV</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</b>	100%	100%	100%	350.305.000	305.046.931	87,08	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan	12 unit	12 unit	100%	192.520.000	176.452.700	91,65	
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	36 unit	36 unit	100%	74.793.000	57.881.000	77,39	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	82.992.000	70.713.231	85,20	
<b>B</b>	<b>Program Informasi Komunikasi Publik</b>	<b>Persentase Aksesibilitas Informasi Publik</b>	100%	100%	100%	7.040.261.250	6.975.215.110	99,08	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
1	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Aksesibilitas Informasi Publik</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	100%	<b>7.040.261.250</b>	<b>6.975.215.110</b>	<b>99,08</b>	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 dokumen	1 dokumen	100%	1.046.399.800	1.032.367.429	98,66	
2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi	3 dokumen	3 Dokumen	100%	1.998.486.000	1.977.691.040	98,96	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi	3 dokumen	3 Dokumen	100%	1.688.649.950	1.688.243.230	99,98	
4	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah media informasi	4 dokumen	4 Dokumen	100%	1.378.863.750	1.360.461.571	98,67	
5	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah layanan	1 dokumen	1 dokumen	100%	788.707.000	782.869.340	99,26	
6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 orang	30 orang	100%	38.610.000	38.610.000	100,00	
7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 unit	8 unit	100%	100.544.750	94.972.500	94,46	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
<b>C</b>	<b>PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Cakupan Layanan Teknologi Informatika</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>17.132.246.700</b>	<b>15.945.630.574</b>	<b>93,07</b>	
<b>I</b>	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14.702.209.950</b>	<b>13.602.310.180</b>	<b>92,52</b>	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 Dokumen	<b>100%</b>	403.725.350	368.091.493	<b>91,17</b>	
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Unit	3 Unit	<b>100%</b>	14.298.484.600	13.234.218.687	<b>92,56</b>	
<b>II</b>	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase perangkat daerah yang terlayani dalam bidang TIK</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2.430.036.750</b>	<b>2.343.320.394</b>	<b>96,43</b>	
1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 unit	2 Unit	<b>100%</b>	744.153.400	708.810.600	<b>95,25</b>	
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan informasi elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	12 Perangkat Daerah	12 Prangkat Daerah	<b>100%</b>	272.043.500	271.338.950	<b>99,74</b>	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 unit	2Unit	100%	339.033.550	336.143.850	99,15	
4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 dokumen	1	100%	494.272.600	456.459.352	92,35	
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	1	100%	157.636.500	154.868.385	98,24	
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 dokumen	1	100%	422.897.200	415.699.257	98,30	
<b>URUSAN STATISTIK SEKTORAL</b>									
D	<b>PENYELENGGARA STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Data Sektoral yang tersedia</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>100%</b>	<b>1.177.177.900</b>	<b>1.158.079.220</b>	<b>98,38</b>	
I	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Data Sektoral yang tersedia</b>	<b>30,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>100%</b>	<b>1.177.177.900</b>	<b>1.158.079.220</b>	<b>98,38</b>	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 dokumen	2 Dokumen	100%	952.358.000	950.859.800	99,84	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	38 orang	38 orang	100%	47.651.000	45.212.980	94,88	
3	membangun metadata statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 dokumen	1 dokumen	100%	120.279.000	105.980.540	88,11	
4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	90 orang	90 orang	100%	56.889.900	56.025.900	98,48	
<b>E</b>	<b>PENYELENGGARA PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>70,00%</b>	<b>70,00%</b>	<b>100%</b>	<b>2.130.722.250</b>	<b>2.112.655.600</b>	<b>99,15</b>	
<b>I</b>	<b>Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Aplikasi yang Diamankan</b>	<b>70,00%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	<b>2.050.079.250</b>	<b>2.042.004.600</b>	<b>99,61</b>	
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	26 Perangkat Daerah	26 Perangkat Daerah	100%	2.050.079.250	2.042.004.600	99,61	

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA KEGIATAN (KELUARAN)	REALISASI KINERJA	REALISASI FISIK	ANGGARAN (RP)	REALISASI KEUANGAN (RP)	REALISASI KEUANGAN TERHADAP ANGGARAN (%)	KETERANGAN
II	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Jaring Komunikasi Sandi</b>	5,4 %	<b>5,40%</b>	<b>100%</b>	<b>80.643.000</b>	<b>70.651.000</b>	<b>87,61</b>	
1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	37 Perangkat Daerah	<b>100%</b>	80.643.000	70.651.000	<b>87,61</b>	
		<b>Total</b>			<b>100%</b>	<b>38.218.075.139</b>	<b>35.994.725.607</b>	<b>94,18</b>	

Semua program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Capaian fisik program/kegiatan Diskominfo Kota Depok terlaksana sebesar 100%. Sedangkan realisasi keuangan belanja langsung mencapai 94,18%. Sebagian besar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan, alasan tidak diserapnya anggaran dikarenakan adanya efisiensi pengadaan barang dan jasa dan penyerapan anggaran sesuai kebutuhan. Untuk sub kegiatan penyelenggaraan jaringan intra pemerintah daerah terdapat silpa sebesar Rp. 2.223.349.532,- (Dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dikarenakan saat ini masyarakat telah mulai beraktifitas normal kembali dan proses belajar mengajar telah kembali dilaksanakan secara *offline*, sehingga penggunaan internet untuk pembelajaran jarak jauh semakin menurun dan hal ini menyebabkan biaya tagihan semakin berkurang.

### **3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan**

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tabel 3.9.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
								(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1						<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas  Proses SPBE	2.70	3.55	131,48	Program : Aplikasi dan Informatika		17.132.246.700	15.945.630.574	93.07
						1	Pengelolaan I ma Domain yang telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Do ain di Lin gkup Pemerintah Di erah Kabupaten/ Kota	14.702.709.950	13.602.310.180	92.52
						1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	403.725.350	368.091.493	91.17
						2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	14.298.484.600	13.234.218.687	92.56

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
								(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
						II	<b>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.430.036.750</b>	<b>2.343.320.394</b>	<b>96.43</b>
						3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	744.153.400	708.810.600	95,25
						4	Koordinasi dan Sinkronisasi Data Pemerintah Daerah	272.043.500	271.338.950	99,74
						5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik	339.033.550	336.143.850	99,24
						6	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	494.272.600	456.459.352	92,35

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
								(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
						5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	157.636.500	154.868.385	98,24
						6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	422.897.200	415.699.257	98,30
2						<b>URUSAN PERSANDIAN</b>				
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2.5	2.5	100	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		2.130.722.250	2.112.655.600	99,61
						I	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	2.050.079.250	2.042.004.600	99,61

						1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.050.079.250	2.042.004.600	99,61
						II	<b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>80.643.000</b>	<b>70.651.000</b>	<b>87,61</b>
						2	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80.643.000	70.651.000	87,61

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	
							(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3						<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	86%	93.18%	1.08	Program Informasi Komunikasi Publik	7.040.261.250	6.975.215.110	99,08	
						1	Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.040.261.250	6.975.215.110	99,08
						1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1.046.399.800	1.032.367.429	98,66
						2	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.998.486.000	1.977.691.040	98,96
						3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.688.649.950	1.688.243.230	99,98
						4	Pelayanan Informasi Publik	1.378.863.750	1.360.461.571	98,67
						5	Manajemen Komunikasi Krisis	788.707.000	782.869.340	99,26

						6	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	38.610.000	38.610.000	100
						7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.544.750	94.972.500	94,46

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
								(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
4						<b>URUSAN STATISTIK</b>				
	Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	20%	20%	100	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		1.177.177.900	1.158.079.220	98,38
I						Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	1.177.177.900	1.158.079.220	98,38	
1						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	952.358.000	950.859.800	99,84	
2						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistic daerah yang terintegrasi	45.212.980	45.212.980	94,88	
3						Membangun metadata statistic sektoral	120.279.000	105.980.540	88,11	
4						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	56.889.900	56.025.900	98,48	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
							(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5						<b>URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
	Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai Sakip Diskominfo	75.85	77.75	1.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.737.667.039	9.803.145.103	91,30
I						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.906.600	81.826.600	97,52
1						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.761.300	47.811.300	96,08
2						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.145.300	34.015.300	99,62
II						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.060.746.839	8.211.859.335	90,63
1						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.041.249.189	8.192.373.685	90,61
2						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	19.497.650	19.485.650	99,94

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
								(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
5						<b>URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
						III	<b>Kegiatan Administrasi Umum Daerah Perangkat</b>	<b>1.242.708.600</b>	<b>1.204.412.237</b>	<b>96,92</b>
						1	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	7.195.000	7.195.000	100
						2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	515.902.000	484.268.530	93,87
						3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.482.600	13.776.600	83,58
						4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	143.807.000	143.570.000	99,84
						5	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	36.638.000	36.638.000	100
						6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.684.000	518.964.107	99,29

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	%
								(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
5						<b>URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
						IV	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	350.305.000	305.046.931	87,08
						1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	192.520.000	176.452.700	91,65
						2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.793.000	57.881.000	77,39
						3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.992.000	70.713.231	85,20

### 3.8. Realisasi Anggaran Per Sasaran

Total Anggaran Diskominfo Kota Depok Tahun 2023 sebesar Rp. 38,218,075,139 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh puluh lima ribu serratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 35,994,725,607 (Tiga puluh lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh rupiah) atau dengan persentase sebesar 94.18%. Jika dilihat dari realisasi anggaran tiap sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan/sub kegiatan di sasaran ke-2 yaitu sebesar 99,61% dan yang terendah pada program/kegiatan/sub kegiatan di sasaran ke-1 yaitu sebesar 93,07%. Anggaran dan realisasi belanja di Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Per Sasaran**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPBE	Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses SPBE	2,70	3,55	17,132,246,700	15.945.630.574	93,07
Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	2,5	2,5	2,130,722,250	2,112,655,600	99,61
Meningkatnya kualitas dan kuantitas diseminasi informasi dan komunikasi publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	86%	93,18 %	7.040.261.250	6.975.215.110	99,08

Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	50%	50%	1.177.177.900	1.158.079.220	98,38
Meningkatkan Kapasitas dan Pengendalian Internal	Nilai Sakip Diskominfo	75,85	77,75	10.737.667.039	9.803.145.103	90.09

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2021 - 2026. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dapat dinyatakan sangat berhasil. Ada beberapa perubahan serta pengalihan prioritas program dan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa pandemi tanpa merubah arah dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Diskominfo Kota Depok.

Hasil Capaian Kinerja Sasaran Diskominfo Kota Depok Tahun 2023 dari 5 (lima) sasaran terdapat 3 (tiga) sasaran yang melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Pengujian Keamanan Informasi (120%), Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik (160%) dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan SPBE (131.48%). Terdapat 1 (satu) sasaran yang belum ada realisasinya yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Pengendalian Internal.

Terdapat 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 38,218,075,139 (Tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 35,994,725,607 (Tiga puluh lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau dengan persentase sebesar 94.18%. dan realisasi fisik sebesar 99.73%.

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok sepanjang tahun 2023, dapat dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
- b. Sosialisasi terus menerus mengenai pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Depok kepada masyarakat maupun berbagai perangkat daerah di Kota Depok melalui media social, website, media luar ruang (videotron, baliho, spanduk dan stiker) untuk mensukseskan dan memaksimalkan penggunaan berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertical terkait layanan informasi dan layanan pengaduan.
- d. Sosialisasi dan pembinaan kepada semua perangkat daerah agar mempunyai pemahaman yang sama terkait TIK, informasi dan komunikasi publik serta satu data Kota Depok.
- e. Penguatan komitmen dari Perangkat Daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan Satu Data Kota Depok dengan melakukan update dan input data sesuai jadwal rilis yang telah disepakati.
- f. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
- g. Meningkatkan penyediaan layanan keamanan dan informasi publik.

Demikian LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI KEGIATAN

### ➤ Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

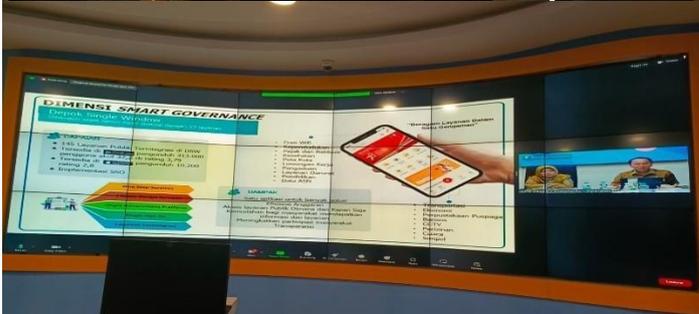


### ➤ Evaluasi Smart City

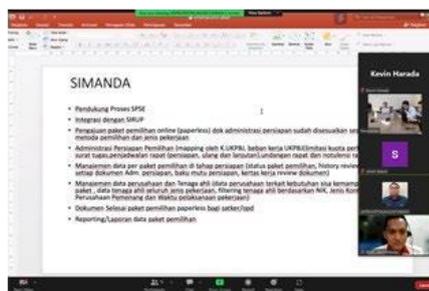
#### Tahap 1



## Tahap 2



## ➤ Integrasi dan Pendampingan Tanda Tangan Elektronik di Perangkat Daerah



➤ **Penetration Test**



➤ **Bimtek Jaringan Komunikasi Sandi Internal**



➤ **Pelatihan Agen Transformasi Digital**



➤ **Keterbukaan Informasi Publik**



➤ **Sosialisasi Internet Sehat**



➤ **Pendampingan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan daftar informasi yang dikecualikan**

